

INDEKS KUALITAS MANUSIA DESA:
Studi Kasus pada Desa Buahan dan Abuan (Kabupaten Bangli) serta
Desa Pejeng Kelod dan Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali
Village Human Quality Index:
Case Study in Buahan and Abuan Village (Bangli Regency) as well as
Pejeng Kelod and Pejeng Kawan Village (Gianyar Regency), Bali Province



Sonia Fany Satria, S.Hum.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Amirul Mu'minin, S.Pi.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Siti Aisyah Fatmah, S.E.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Hafifah Aninadia, A.Md.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Cornela Rizki Ananda Rachma, S.Tr.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Yuliana Erlin Henriques, S.Ak.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia di desa merupakan potensi desa yang menjadi aset dasar untuk dikelola dan dikembangkan demi kelangsungan dan perkembangan desa, sehingga kemampuan desa untuk mengembangkan kesejahteraan rakyatnya dapat terwujud. Strategi untuk meningkatkan kualitas manusia di desa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pengukuran mengenai kualitas manusia desa dapat dilakukan dengan Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes). Indeks ini merupakan gabungan dari 4 indeks komposit, diantaranya (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) kesejahteraan; dan (4) kesetaraan gender. Pengukuran Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes) dilakukan dengan cara menyimulasikan pengukuran di empat desa, yaitu Desa Buahan dan Abuan (Kabupaten Bangli) serta Desa Pejeng Kelod dan Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali. Hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat tiga desa (Desa Buahan, Pejeng Kelod, dan Pejeng Kawan) memiliki poin di atas 80, sehingga dikategorikan menjadi desa dengan IKMDes sangat maju. Sedangkan satu desa (Desa Abuan) berkategori maju. Rekomendasi dari *policy brief* ini adalah (1) menyusun regulasi tentang IKMDes sebagai dasar pengukuran kualitas sumber daya manusia desa; (2) menyusun regulasi tentang hasil IKMDes sebagai data yang dapat digunakan oleh semua instansi; (3) mengevaluasi dan menyelaraskan IKMDes dengan Indeks Desa Membangun (IDM); (4) meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia desa melalui pendidikan lanjutan; dan (5) meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: IKMDes; kesejahteraan; kesehatan; kesetaraan gender; pendidikan; sumber daya manusia

EXECUTIVE SUMMARY

Human resources in the village are potential assets that need to be managed and developed for the continuity and development of the village, so that the village's ability to develop the welfare of its people can be realized. The strategy to improve human quality in

villages is to improve the quality of education, welfare, health, and gender equality. Measurement of the quality of the human resources in the village can be done using the Village Human Quality Index (IKMDes). This index is a combination of 4 composite indices, including (1) health; (2) education; (3) welfare; and (4) gender equality. Measurement of the Village Human Quality Index (IKMDes) is carried out by simulating measurements in four villages, namely Buahman Village and Abuan Village (Bangli Regency), and Pejeng Kelod Village and Pejeng Kawan Village (Gianyar Regency), Bali Province. The measurement results show that there are three villages (Buahman Village, Pejeng Kelod Village, and Pejeng Kawan Village) have scores above 80. Thus categorized as villages with very advanced IKMDes, while one village (Abuan Village) is categorized as advanced. The recommendations from this paper are (1) drafting a Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration on IKMDes as a basis for measuring the quality of village human resources; (2) drafting a Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration on IKMDes results as data that can be used by all agencies; (3) evaluating and aligning IKMDes with the Village Development Index (IDM); (4) raising awareness among the community to improve the quality of village human resources through further education; and (5) increasing the role of women in village development.

Keywords: civil servant; Community Self-Reliance Motivators; functional position; learning content; online; position equalization

PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusianya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara tepat dapat menjadikan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Tanpa sumber daya manusia maka sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat dikelola (Tyas dan Ikhsani, 2015). Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dimulai dari desa. Desa yang merupakan lingkup pemerintahan terkecil, dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusianya, sehingga pembangunan desa untuk mengembangkan kesejahteraan rakyatnya dapat terwujud.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang baik, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas infrastruktur lainnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa (Huda dan Indahsari,



Danang Pambudi, S.M.

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Sumedi Raharjo

Badan Pengembangan dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi - Kemendes PDTT

Pengelola Data dan Informasi

2021). Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (keahlian) tenaga kerja, sehingga produktivitas akan ikut meningkat (Adisaputro dan Rosidi, 2020). Produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga penghasilan dan kesejahteraan penduduk dapat meningkat (Huda dan Indahsari, 2021). Kesehatan merupakan unsur dasar dan alami manusia yang diperlukan untuk awal kehidupan dan pertumbuhan manusia. Menurut Kementerian Kesehatan dalam Notoatmodjo (2008), jika terdapat anak yang lahir dengan kondisi kekurangan unsur kesehatannya, maka pertumbuhan serta perkembangan anak, secara fisik maupun mental, akan terhambat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mutu kualitas manusia tersebut rendah. Penggunaan seluruh sumber daya manusia yang ada di desa, termasuk perempuan, dapat mendorong peningkatan ekonomi desa. Hal ini karena talenta-talenta terbaik diperkerjakan di semua lini tanpa memandang gender.

Berdasarkan uraian tersebut maka strategi untuk meningkatkan kualitas manusia di desa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pengukuran mengenai kualitas manusia desa dapat dilakukan dengan Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes). Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes) adalah sebuah indeks untuk mengukur tingkat kualitas masyarakat desa secara keseluruhan. Indeks ini merupakan gabungan dari 4 komposit, diantaranya: (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) kesejahteraan; dan (4) kesetaraan gender.

DESKRIPSI MASALAH

BUKTI-BUKTI

Pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), salah satu tujuan pengukuran IDM adalah menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengategorian desa oleh IDM dan IKMDes ditentukan berdasarkan nilai indikator yang diukur. **Tabel 1** berikut adalah perbedaan pengategorian desa antara IDM dan IKMDes berdasarkan nilai indikatornya.

Tabel 1. Perbedaan kategori desa IDM dan IKMDes

No.	Kategori Desa	Nilai IDM	Nilai IKMDes
1	Desa Sangat Tertinggal	<0,491	<20
2	Desa Tertinggal	>0,491 - <0,599	21 – 40
3	Desa Berkembang	>0,599 - <0,707	41 – 60
4	Desa Maju	>0,707 - <0,815	61 – 80
5	Desa Mandiri (IDM)/Desa Sangat Maju (IKMDes)	>0,815 – 0,92	81 – 100

Sumber: Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016 dan hasil analisis

Pengukuran Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes) dilakukan dengan cara menyimulasikan pengukuran di empat desa, yaitu Desa Buahan dan Desa Abuan (Kabupaten Bangli) serta Desa Pejeng Kelod dan Desa Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali. **Tabel 2** berikut adalah hasil pengukuran IKMDes yang telah dilakukan di keempat desa tersebut.

Tabel 2. Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes)

Indeks	No.	Indikator Pengukuran	Poin IKMDes			
			Buahan	Abuan	Pejeng Kelod	Pejeng Kawan
Kesehatan	1.	Jumlah warga desa yang memiliki asuransi kesehatan.	100	84	100	97
	2.	Jumlah warga melahirkan di fasilitas kesehatan.	100	100	100	100
	3.	Jumlah balita tidak gizi buruk.	100	100	100	100
	4.	Jumlah balita tidak stunting.	100	94	100	96
	5.	Tingkat bayi mendapat ASI eksklusif.	100	100	78	100
	6.	Persentase masyarakat sakit mengakses rumah sakit.	100	100	100	100

Indeks	No.	Indikator Pengukuran	Poin IKMDes			
			Buahan	Abuan	Pejeng Kelod	Pejeng Kawan
Kesejahteraan	1.	Jumlah individu dengan pengeluaran per-bulan di atas garis kemiskinan rata-rata individu kabupaten.	100	63	97	97
	2.	Jumlah KK dengan pengeluaran per-bulan di atas garis kemiskinan kabupaten.	100	94	72	100
	3.	Jumlah KK yang menggunakan listrik.	100	94	100	100
	4.	Jumlah KK yang menggunakan PAM/PDAM/sumur bor.	100	94	100	100
	5.	Jumlah KK memiliki hunian layak.	99	94	100	100
	6.	Jumlah KK memiliki sanitasi layak.	99	94	100	99
	7.	Jumlah KK dengan akses terhadap air minum layak (air minum, air baku, dll.).	100	87	99	96
	8.	Jumlah pekerja formal (ASN, TNI, Polri, swasta).	14	2	9	47
Pendidikan	1.	Individu yang mendapat pendidikan lanjutan (D1, D2, D3, D4, S1, S2, dan S3) (>18 tahun).	10	3	19	36
	2.	Angka partisipasi sekolah SD (6-12 tahun).	92	92	87	89
	3.	Angka partisipasi sekolah SMP dan SMA (13-18 tahun).	85	85	85	96
Kesetaraan Gender	1.	Jumlah usia kawin pertama perempuan di atas 19 tahun.	100	100	100	95
	2.	Jumlah perempuan di BPD.	9	9	28	9
	3.	Jumlah perempuan yang terlibat musyawarah desa.	5	28	48	20
	4.	Jumlah perempuan yang mencapai Pendidikan lanjutan (D1 hingga S3 usia 18-56).	59	3	N/A	13
	5.	Jumlah Perempuan berusia 15-18 tahun yang bersekolah SMA.	100	N/A	100	100
Rata-Rata IKMDes			81	72	82	81

Sumber: Data primer (2024) diolah

Berdasarkan hasil pengukuran IKMDes di keempat desa (**Tabel 3**), dapat diketahui bahwa terdapat tiga desa (Desa Buahan, Pejeng Kelod, dan Pejeng Kawan) memiliki poin di atas 80. Dengan demikian dapat dikategorikan menjadi desa dengan IKMDes sangat maju. Sedangkan satu desa (Desa Abuan) berkategori maju. Hasil tersebut sejalan dengan nilai dan pengategorian dari IDM. Namun pada Desa Pejeng Kawan, nilai dan kategori desa meningkat menjadi desa sangat maju.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengukuran IDM dan IKMDes pada Empat Desa Percontohan IKMDes

No	Desa	Nilai IDM	Kategori IDM	Nilai IKMDes	Kategori IKMDes
1	Desa Buahan	0,86	Mandiri	0,81	Sangat Maju
2	Desa Abuan	0,81	Maju	0,72	Maju
3	Desa Pejeng Kawan	0,76	Maju	0,82	Sangat Maju
4	Desa Pejeng Kelod	0,88	Mandiri	0,81	Sangat Maju

Sumber: Kepmendes PDTT No. 174 Tahun 2023 dan Data primer (2024) diolah

ANALISIS

Indeks Kesehatan

Masyarakat Desa Buahan, Abuan, Pejeng Kelod, dan Pejeng Kawan telah memiliki asuransi kesehatan serta sadar terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan saat sakit maupun saat melahirkan. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan di keempat desa sangat tinggi. Kemudahan masyarakat dalam mengakses kesehatan menjadikan masyarakat memilih untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan

baik. Hal ini berdampak pada kemampuan kerja serta produktivitas kerja masyarakat. Meningkatnya kemampuan serta produktivitas kerja menyebabkan peningkatan dalam pendapatan yang kemudian dapat terhindar dari kemiskinan (Widayati dkk., 2023).

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga terbukti dengan tidak ada balita bergizi buruk, angka stunting rendah, dan jumlah bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif tinggi. Dengan terjaminnya kesehatan anak yang lahir di keempat desa tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak dapat terjamin kualitasnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa mutu kualitas manusia di keempat desa tersebut tinggi (Notoatmodjo, 2008).

Indeks Kesejahteraan

Sebagian besar masyarakat dari keempat desa telah memiliki hunian layak, dimana air bersih diperoleh dari penggunaan PAM/PDAM/sumur bor, serta hunian tersebut telah tersambung jaringan listrik. Selain itu masyarakat juga telah memiliki sanitasi yang baik pada hunian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan primer dari setiap Kepala Keluarga yang ada di keempat desa telah terpenuhi dengan baik. Akses terhadap air minum layak di keempat desa terpenuhi dengan baik. Walaupun demikian, pada Desa Abuan, tergolong sedikit lebih rendah daripada desa lainnya dalam memperoleh akses terhadap air minum.

Jumlah pekerja formal di keempat desa tergolong masih rendah, yaitu masih berada di bawah 50%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan formal. Rata-rata pekerjaan formal memerlukan pendidikan yang tinggi (sarjana). Semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang (tenaga kerja), maka peluang untuk bekerja semakin luas (Fitri dan Junaidi, 2016). Menurut Zacky dan Sholihah (2023), tingginya pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu akan menjadikan individu tersebut mudah untuk bersaing dan bertahan di dunia kerja. Provinsi Bali merupakan daerah wisata sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di sektor informal sebagai pemandu wisata maupun bekerja informal di bidang lainnya. Menurut Rini (2012), pekerjaan di bidang informal dapat memengaruhi pendapatan masyarakat. Sebab pendapatan dalam pekerjaan informal cenderung kurang stabil. Sehingga dapat menyebabkan pengeluaran individu menjadi lebih rendah dan berada di bawah garis kemiskinan.

Indeks Pendidikan

Masyarakat Desa Buahan, Desa Abuan, Desa Pejeng Kelod, dan Desa Pejeng Kawan rata-rata merupakan lulusan SMA atau sederajat dan hanya sedikit masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Setelah lulus SMA atau sederajat, masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor pariwisata di Kabupaten Bali atau bekerja sebagai kru kapal pesiar di luar negeri. Perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan antarindividu menyebabkan perbedaan produktivitas dan pekerjaan yang bisa dilakukan. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan perbedaan dalam pendapatan. Semakin tinggi pendidikan dan ketrampilan seseorang maka akan semakin tinggi produktivitasnya serta semakin terbuka lebar pekerjaan yang memberikan gaji dan upah yang tinggi. Sehingga hasil akhirnya akan semakin tinggi pula pendapatannya. Perbedaan tingkat pendidikan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan, pola asuh, akses kepada sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain (Widayati dkk., 2023).

Indeks Kesetaraan Gender

Masyarakat keempat desa memiliki kesadaran akan pernikahan yang tinggi. Jumlah perempuan menikah di bawah usia pernikahan (19 tahun) hampir tidak ada. Namun pada Desa Pejeng Kawan masih terdapat perempuan menikah di bawah usia pernikahan walaupun dengan jumlah sangat sedikit. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pernikahan usia dini adalah kesadaran dari masyarakat, di mana orang tua lebih mengizinkan anaknya menikah ketika ekonominya sudah terjamin. Sebab orang tua saat ini menginginkan penerusnya menjadi lebih baik dari dirinya. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan usia pernikahan pertama bagi perempuan, memberi dampak terhadap rendahnya angka stunting di keempat desa.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa melalui keterlibatan di dalam Badan Permasyarakatan Desa (BPD) maupun dalam musyawarah desa (musdes) masih rendah (dibawah 30%). Hanya di Desa Pejeng Kelod keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa tergolong tinggi. Pendidikan perempuan di keempat desa rata-rata hanya sampai SMA atau sederajat. Sedikit perempuan yang melanjutkan ke jenjang kuliah. Keterlibatan perempuan dalam BPD maupun musdes sangat penting untuk pembangunan desa. Talenta-talenta terbaik untuk pembangunan desa tidak memandang gender.

REKOMENDASI

- 1. Menyusun regulasi tentang IKMDes sebagai dasar pengukuran kualitas sumber daya manusia desa**
IKMDes merupakan indikator pengukuran baru, sehingga diperlukan adanya dasar hukum untuk menguatkan indikator-indikator pengukurannya. Penyusunan Permendes PDTT untuk IKMDes juga berfungsi untuk menentukan indikator-indikator apa saja yang dilakukan pengukuran, perhitungan untuk menentukan nilai indikator, analisis terhadap indikator, dan penentuan hasil pengukuran.
- 2. Menyusun regulasi tentang hasil IKMDes sebagai data yang dapat dipergunakan oleh semua instansi**
Hasil pengukuran IKMDes nantinya dibuat menjadi Kepmendes PDTT agar nantinya hasil IKMDes memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk skala yang lebih luas dalam membuat kebijakan bagi pemangku kepentingan. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan pembangunan manusia desa.
- 3. Mengevaluasi dan menyelaraskan IKMDes dengan IDM**
Perlu dilakukan evaluasi indikator-indikator pada IKMDes dengan IDM, supaya tidak terjadi *double input data*. Pemerintah desa selama ini selalu diminta data oleh kementerian/lembaga dengan data yang di-*input* mirip satu dengan yang lainnya. IKMDes bertujuan untuk melengkapi data yang belum ada pada IDM. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kedua indeks pengukuran tersebut agar tidak saling tumpang tindih datanya.
- 4. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia desa melalui pendidikan lanjutan**
Salah satu indikator kualitas suatu bangsa adalah kualitas manusianya. Kualitas manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2024). Wajib belajar 9 tahun yang sudah diwacanakan oleh pemerintah merupakan dasar untuk menuju manusia berkualitas. Namun wajib belajar 9 tahun harus juga dilanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga kuliah. Menurut Widayati dkk. (2023), apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka orang tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan kerja semakin besar, sehingga pendapatan juga akan semakin besar. Akibatnya individu tersebut dapat terhindar dari kemiskinan.
Pemerintah perlu memberikan solusi atas mahalnya biaya pendidikan pada jenjang lanjutan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain pemberian beasiswa bagi masyarakat, pelaksanaan sekolah gratis, serta subsidi silang untuk biaya pendidikan.
- 5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa**
Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, namun selama ini peran tersebut masih belum maksimal. Kebijakan pemerintah mengenai pengarusutamaan gender dan pelibatan peran perempuan dalam pembangunan desa diharapkan dapat segera terealisasi. Peraturan perundangan di Indonesia selama ini masih mengalami bias gender. Meskipun pasal 27 UUD RI tahun 1945 menjamin kesamaan hak bagi seluruh warganegara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, namun masih banyak ditemukan perempuan yang mengalami diskriminasi secara materi dan budaya hukum, serta tidak berkeadilan gender.

REFERENSI UTAMA

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 25 April 2024. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 8 Agustus 2023. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. 24 Februari 2016. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 300. Jakarta.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023. 14 Juli 2023. Jakarta

- Adisaputro, S.E., & Rosidi, I. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023 Volume 18*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fitri & Junaidi. (2016). Pengaruh Pendidikan, Upah, dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5(1).
- Huda, N., & Indahsari, K. (2021). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1).
- Notoatmodjo, S. (2008). Kesehatan dan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 2(5).
- Rini, H.S. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *Jurnal Komunitas*, 4(2).
- Tyas, A.A.W.P., & Ikhsani, K.T.W. (2015). Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*, 12(1).
- Widayati, T. (2023). *Perekonomian Indonesia Perkembangan dan Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. Semarang: Sonpedia.
- Zacky, M. & Sholihah R.A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesempatan Berkarir: Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1).